

**PENGARUH KEBIJAKAN PENERAPAN SPO TERHADAP PROFITABILITAS
PISANG MAS KIRANA DI KABUPATEN LUMAJANG**

Ariq Dewi Maharani, Rudi Wibowo & Triana Dewi Hapsari
Program Studi Agribisnis, Program Pascasarjana, Universitas Jember
ariqdewi@gmail.com

Received: 30 September 2016; Accepted: 13 Oktober 2016; Published: 30 Oktober 2016
DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/agriekonomika.v5i2.1828>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek profitabilitas pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang, dan menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive method) di Kabupaten Lumajang. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Analisa data menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) untuk menganalisis aspek profitabilitas dan dampak kebijakan pemerintah terhadap pisang mas Kirana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komoditas pisang mas Kirana menguntungkan secara finansial dan ekonomi yang ditunjukkan dengan keuntungan privat (PP) Rp 10.444.911,8 per hektar dan keuntungan sosial (SP) sebesar Rp 23.108.983,7 per hektar. Keuntungan privat pisang mas Kirana lebih kecil daripada keuntungan sosialnya (PP<SP) menunjukkan bahwa terjadi distorsi pasar pada komoditas pisang mas Kirana, terdapat dampak kebijakan subsidi terhadap harga-harga input pada usahatani pisang mas Kirana; masih belum ada lembaga yang dapat memberikan pelayanan yang kompetitif serta informasi yang lengkap dan rendahnya harga beli pisang mas Kirana di dalam negeri.

Kata Kunci : Pisang mas Kirana, PAM, Profitabilitas, Kebijakan

THE IMPACT OF GOVERNMENT POLICY ON KIRANA MAS BANANA

ABSTRACT

The purpose of this research for: to analyse the aspect of profitability Kirana Mas banana and to analyse impact of government policy on Kirana Mas banana in Lumajang District. Determination of location was done intentionally or purposive method in Lumajang regency. The data that was used covering primary data and secondary data. Data analysis used Policy Analysis Matrix (PAM) for knowing of profitability aspect and impact of government policy on Kirana Mas banana. The results showed that Commodity of Kirana Mas banana has financially and economically beneficial, shown by private profit (PP) Rp 10,444,911.8 per hectare and social benefits (SP) Rp 23,108,983.7 per hectare. Private profits of "Kirana mas" banana are smaller than social benefit (PP < SP), shows that the distortion in the commodity markets, there is the impact of subsidies on input prices on a banana farm; there is still no institution that can provide competitive services and complete information and the low purchase price of this banana in the country.

Keywords : Kirana Mas Banana, PAM, Profitability, Policy

PENDAHULUAN

Hortikultura merupakan salah satu sub-sektor penting dalam pembangunan pertanian. Program pengembangan hortikultura di Jawa Timur bertujuan meningkatkan produksi dan mutu produk unggulan yang berdaya saing, mengembangkan berbagai produk untuk mendukung diversifikasi pangan, mendorong perkembangan ekonomi daerah dan nasional, mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan devisa serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem dan usaha agribisnis hortikultura melalui penerapan paket teknologi sesuai standar prosedur operasional disetiap tingkatan kegiatan.

Buah pisang yang merupakan salah satu produk hortikultura yang menjadi buah unggulan di Indonesia yang dapat dikembangkan secara intensif untuk mendukung program utama pemerintah pusat di bidang pertanian dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu jenis pisang yang sekarang ini menjadi primadona dan menarik perhatian di Indonesia adalah pisang mas Kirana. Menurut Solicha (2011), di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, dapat ditemukan buah pisang mas Kirana dan buah tersebut hanya tumbuh di lereng Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl), sehingga tidak ditemukan di daerah lain.

Pisang mas kirana Kabupaten Lumajang merupakan salah satu varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 16/Kpts/SR.120/12/2005, tanggal 26 Desember 2005. Sejak Menteri Pertanian pada tahun 2005 menetapkan pisang mas Kirana sebagai tanaman hortikultura unggulan Jawa Timur itu, pemerintah setempat melakukan berbagai upaya pengembangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

Varietas pisang mas Kirana ini biasanya dipakai untuk hidangan tamu dimeja makan, selain rasanya yang manis, tampilan pisang ini cukup cantik dan aroma

yang menggoda selera. Para produsen pisang mas Kirana di Lumajang membagi jenis kategori kualitasnya. Untuk kualitas B, biasanya pisang disalurkan untuk dijual di pasar tradisional. Sedangkan untuk kualitas A, disalurkan ke distributor untuk kemudian dijual ke pasar swalayan di kota-kota besar di seluruh Jawa Timur hingga Indonesia (Frannoto, 2011).

Sekarang ini, pisang mas Kirana menjadi salah satu varietas unggulan di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Lumajang menjadi sentra produksi pisang mas Kirana. Hal ini mendapat sambutan yang sangat baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang mencoba menjalankan perannya untuk membantu menguatkan citra pisang mas Kirana dengan menjadikan pisang mas Kirana ini menjadi icon Kabupaten Lumajang. Pemerintah memiliki peran strategis dalam membantu kemajuan agribisnis pisang mas Kirana.

Pisang mas Kirana tersebut yang sudah dikenal di tingkat nasional, bahkan kini sudah dikenal di tingkat internasional. Permintaan pasar akan pisang mas Kirana semakin lama semakin meningkat, baik dari pasar lokal maupun pasar internasional. Hal tersebut karena pisang mas Kirana yang dihasilkan di Kabupaten Lumajang selain sudah bersertifikat, pisang mas Kirana memiliki kualitas produksi yang baik dan juga pada proses produksinya sudah melakukan penerapan sistem penjaminan mutu melalui penerapan SPO (Standar Prosedur Operasional) yang didampingi oleh Dinas Pertanian setempat serta pisang mas Kirana tersebut termasuk pisang organik. Penerapan sistem penjaminan mutu yang dilakukan tersebut mulai dari proses budidaya, perbaikan penanganan panen sampai pascapanen sehingga menghasilkan buah yang bermutu tinggi.

Penerapan SPO pada pisang mas Kirana merupakan mekanisme standar mutu dan jaminan mutu buah pisang mas Kirana sebagai persyaratan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang wajib dipenuhi oleh seluruh produsen buah

pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang. Program SPO ini mulai memperkenalkan pada petani pisang mas Kirana Kabupaten Lumajang pada tahun 2006. Penerapan SPO tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh petani dan diadakannya pembinaan pada petani dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang. Program tersebut dilakukan mulai dari pembanyakan, pemeliharaan, panen dan pascapanen serta pemasaran hasil produksi. Panen pisang mas Kirana ini dapat dilakukan sepanjang tahun (Direktorat Budidaya Tanaman Buah, 2006:3).

Keunggulan pisang mas Kirana dapat dilihat dari kualitas komoditas itu sendiri. Menurut Sohibul, sekretaris Kelompok Tani Raja Mas Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, kualitas komoditas pisang mas Kirana sudah diakui ditingkat internasional dengan memperoleh sertifikat *Global GAP (Good Agriculture Practice)* dari lembaga Control Union Belanda pada bulan Maret tahun 2013. Adanya sertifikat tersebut menunjukkan bahwa kualitas pisang mas Kirana yang bagus berpotensi untuk dikembangkan di pasar internasional. Pisang mas Kirana juga memiliki sertifikat prima yang diperoleh dari dalam negeri. Sertifikat prima tersebut menunjukkan bahwa pisang mas Kirana aman untuk dikonsumsi dan bebas dari pestisida dan zat-zat kimia lainnya. Pisang mas Kirana mendapat jaminan dan pengakuan pada standar prosedur dan proses produksi pisang mas Kirana dengan cara adanya pengawasan (pemantauan dan pengendalian) melalui mekanisme inspeksi dan indikator mekanisme tersebut adalah berupa penandaan, pelabelan dan sertifikasi pisang mas Kirana. Keunggulan pisang mas Kirana selain dari segi kualitas adalah pisang mas Kirana memiliki warna kulit buah yang cerah dan bersih, bentuk buah yang cukup menarik dan rasa manis yang dimiliki pisang mas Kirana memberikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen dan buah pisang mas Kirana termasuk buah yang mudah untuk dikonsumsi sebagai buah segar dan dihidangkan di meja serta buah pisang mas Kirana juga memiliki

kandungan gizi yang tinggi dan baik untuk kesehatan. Pisang mas Kirana Kabupaten Lumajang memiliki potensi untuk dikembangkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Adanya arus globalisasi atau era perdagangan bebas membuat keinginan untuk dapat menembus pasar internasional semakin terbuka lebar. Untuk dapat menembus pasar internasional atau melakukan ekspor maka komoditas pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang harus memiliki daya saing agar mampu bertahan dan bersaing dengan produk-produk sejenis yang ada di mancanegara. Dalam rangka pengembangan agribisnis pisang mas Kirana tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder melirik pasar internasional. Pengembangan agribisnis pisang mas Kirana dalam perusahaan komoditas pertanian perlu dilakukan dengan mengethui(1) aspek profitabilitas pisang mas Kirana dan (2) dampak adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan komoditas pisang mas Kirana.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur yang merupakan sentra produksi pisang mas Kirana. Pengambilan sampel untuk petani pisang mas Kirana adalah kelompok tani Raja Mas. Kelompok tani tersebut yang memiliki sertifikat *Global GAP* dan sertifikat prima. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari beberapa instansi terkait. Deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis.

Untuk menganalisis aspek profitabilitas komoditas dan dampak kebijakan pemerintah terhadap pisang mas Kirana Kabupaten Lumajang berdasarkan matriks PAM. Matriks PAM yang digunakan sebagai berikut.

Tabel 1
Matriks PAM

Uraian	Biaya			Profit
	Revenue	Input Tradeable	Input non Tradeable	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Pengaruh Divergensi	I	J	K	L

Sumber: Pearson, dkk., 2005

Aspek Profitabilitas

Dimana, *private profit (PP)* adalah keuntungan privat; **A** adalah penerimaan privat; **B** adalah biaya *input tradable* privat; **C** adalah biaya faktor domestik privat

transfer sumber daya yang mengurangi keuntungan sistem

$$NPCO = A / E \tag{4}$$

dimana, *Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)* adalah rasio yang mengukur transfer *output*

$$PP = D = A - B - C \tag{1}$$

$$SP = H = E - F - G \tag{2}$$

Dimana, *social profit (SP)* atau **H** adalah keuntungan sosial; **E** adalah penerimaan sosial; **F** adalah biaya *input tradable* sosial; **G** adalah biaya faktor domestik sosial

Kriteria pengambilan keputusan: NPCO > 1; harga domestik lebih tinggi dibanding harga impor atau ekspor dan sistem usaha tani tersebut tengah menerima proteksi

NPCO < 1; harga domestik lebih rendah dibanding harga dunia, artinya harga domestik tengah didisproteksi

Kriteria pengambila keputusan :

- a. PP bernilai positif (+); petani pisang mas Kirana memperoleh keuntungan dan layak secara finansial
- b. SP bernilai positif (+); petani pisang mas Kirana memperoleh keuntungan dan layak secara ekonomi
- c. PP < SP; terjadi distorsi pasar yang merugikan petani pisang maskirana
- d. PP > SP; tidak terjadi distorsi pasar sehingga dapat menguntungkan petani pisang maskirana

Kebijakan Input

$$IT = J = B - F \tag{5}$$

dimana, *Input Transfer (IT)* atau **J** adalah transfer input; **B** adalah biaya *input tradable* privat; **F** adalah biaya *input tradable* sosial.

Kriteria pengambilan keputusan : IT positif (+); kebijakan pemerintah pada input tradable menyebabkan keuntungan privat lebih besar dari sosial

IT negatif (-); kebijakan pemerintah pada input tradable menyebabkan keuntungan privat lebih besar dari sosial

Dampak kebijakan pemerintah

Kebijakan *Output*

$$OT = I = A - E \tag{3}$$

Dimana, *output transfer (OT)* adalah transfer output; **A** adalah penerimaan privat; **E** adalah penerimaan sosial.

Kriteria pengambila keputusan : OT > 0 atau positif (+); implisit subsidi atau transfer sumber daya yang menambah keuntungan sistem

OT < 0 atau negatif (-); implisit pajak atau

$$NPCI = B / F \tag{6}$$

dimana *Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI)* adalah rasio yang mengukur *input transfer*; **B** adalah biaya *input tradable* privat; **F** adalah biaya *input tradable* sosial.

Kriteria pengambilan keputusan:

NPCI > 1; biaya input dalam negeri lebih tinggi dibanding biaya input pada tingkat harga dunia dan menunjukkan usaha tani dibebani pajak oleh kebijakan yang ada
 NPCI < 1; biaya *input* dalam negeri lebih rendah dibanding biaya harga dunia dan menunjukkan usaha tani disubsidi oleh kebijakan yang ada.

$$FT = K = C - G \quad (7)$$

Dimana, atau *Factor Transfer (FT)* adalah transfer *input non tradable*; **C** adalah biaya *input non tradable* privat; **G** adalah biaya *input non tradable* sosial

Kriteria pengambilan keputusan :

FT > 0 atau positif (+); implisit pajak atau transfer sumber daya yang mengurangi keuntungan sistem

FT < 0 atau negatif (-); implisit subsidi atau transfer sumber daya yang menambah keuntungan sistem

Kebijakan Input – Output

$$EPC = (A - B) / (E - F) \quad (8)$$

Dimana, *effective protection coefficient (EPC)* adalah rasio yang membandingkan nilai tambah pada tingkat harga domestik dengan nilai tambah pada tingkat harga dunia; **A** adalah penerimaan privat; **B** adalah biaya *input tradable* privat; **E** adalah Penerimaan sosial biaya *input tradable* sosial)

Kriteria pengambilan keputusan :

EPC > 1 menunjukkan kebijakan terhadap harga output maupun subsidi terhadap input bermanfaat bagi petani untuk terus mengembangkan usaha taninya (kebijakan masih bersifat protektif)

EPC < 1 menunjukkan kebijakan pemerintah menghambat petani untuk berproduksi.

$$NT = L = D - H \quad (9)$$

Dimana, *Net Transfer (NT)* adalah transfer bersih; **D** adalah keuntungan privat ; **H** adalah keuntungan sosial.

NT > 0 atau positif (+); tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan

pemerintah yang diterapkan pada input dan output

NT < 0 atau negatif (-); berkurangnya surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output

$$PC = D / H \quad (10)$$

dimana, *profitability coefficient (PC)* adalah rasio antara keuntungan privat dan keuntungan sosial.

Kriteria pengambilan keputusan:

PC > 1; keuntungan petani lebih tinggi dibanding keuntungan pada harga sosial

PC < 1; keuntungan petani lebih rendah dibanding keuntungan yang seharusnya diperoleh pada harga sosial.

$$SRP = L / H \quad (11)$$

dimana, *subsidy ratio to producers (SRP)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh dampak transfer; **L** adalah transfer bersih; **H** adalah penerimaan Sosial.

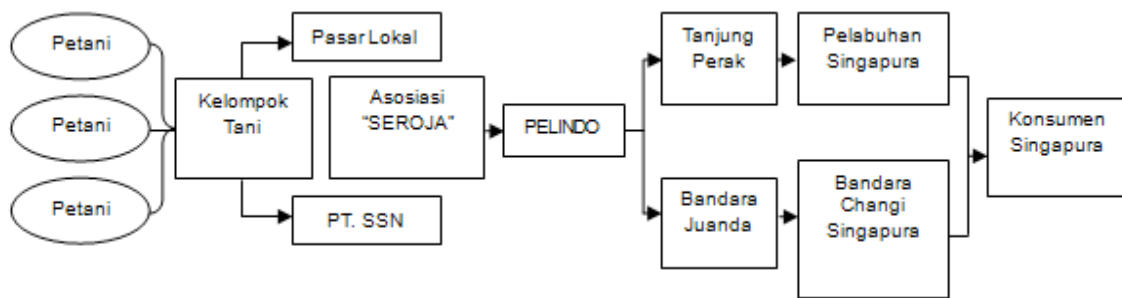
Kriteria pengambilan keputusan:

SRP > 0 atau positif (+); kebijakan pemerintah yang diterapkan menyebabkan petani mengeluarkan biaya produksi terhadap *input* lebih rendah dibanding biaya imbalan untuk berproduksi

SRP < 0 atau negatif (-); kebijakan pemerintah yang diterapkan menyebabkan petani mengeluarkan biaya produksi terhadap input lebih besar dibanding biaya imbalan untuk berproduksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan agribisnis tidak lepas dari peran pemerintah untuk mendukung pengembangan agribisnis di daerah setempat. Peran pemerintah tersebut dapat berupa program-program peningkatan kualitas produk pertanian dengan menggunakan metode-metode atau sistem pengembangan usaha. Peningkatan kualitas produk dapat dilakukan mulai dari proses budidaya sampai perlakuan pada pascapanen. Pada komoditas pisang mas Kirana telah dilaku-



Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Gambar 1
Skema Saluran Pemasaran Pisang Mas Kirana Ekspor ke Singapura

kan penerapan SPO mulai dari proses pembudidayaan, panen sampai pascapanen. Penerapan SPO wajib dipenuhi dan dilakukan oleh petani pisang mas Kirana. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang melalui dinas Pertanian melakukan pembinaan terhadap petani yang melakukan penerapan SPO. Sistem penerapan yang dilakukan dapat diperoleh produk pisang mas Kirana yang berkualitas. Pada pisang mas Kirana yang menerapkan SPO, dilakukan penjarangan anakan. Disekitar induk pohon dilakukan penjarangan pohon maksimal 3 anakan, anakan yang lain dipindahkan ke tempat lain atau lahan yang kosong. Hasil produksi yang diperoleh memiliki ukuran buah yang lebih besar yaitu rata-rata memiliki berat sebesar 0,9 - 2 kg per sisir dan setiap tandan berisiantara 7 - 8 sisir buah. Harga rata-rata pisang mas Kirana pada tahun 2016 sebesar Rp 65.000 per box yang berisi 11 kilogram.

Peran pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pertanian jugamemfasilitasi kerjasama antara kelompok tani dengan pedagang besar (bermitra) yaitu PT. Sewu Segar Nusantara (SSN), PT. Star Fruit dan PT. Catur Kirana Lumajang. Kelompok tani yang bermitra juga mendapat fasilitas rumah kemas dari Bank Nasional Indonesia (BNI) dimana semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan pasca panen dilakukan pada tempat ini. BNI pada usahatani pisang mas Kirana merupakan penyedia modal usaha dan memfasilitasi pengembangan sebuah kawasan kam-

pung BNI Pisang di wilayah Kecamatan Senduro.

Kegiatan pemasaran pisang mas Kirana sejauh ini dilakukan dengan perusahaan mitra dan dilakukan ekspor ke Singapura yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang. Dinas Pertanian dan asosiasi Seroja pisang mas Kirana bekerjasama dengan distributor buah dari Malaysia dalam melakukan ekspor pisang mas Kirana. Adapun bentuk saluran pemasaran pisang mas Kirana pada percobaan ekspor ke Singapura sebagai berikut.

Aspek Profitabilitas Pisang Mas Kirana

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang melalui Dians Pertanian terhadap komoditas pisang mas Kirana dengan melihat aspek profitabilitas komoditas tersebut kemudian menganalisis dampak kebijakan dari pemerintah. Aspek profitabilitas pisang mas Kirana dilakukan analisis keuntungan. Analisis keuntungan komoditas pisang mas Kirana merupakan selisih antara penerimaan (nilai komoditas pisang mas Kirana yang diterima) dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani. Analisis keuntungan pada penelitian ini terdiri dari keuntungan privat dan keuntungan sosial. Keuntungan privat (*Private Profit* atau PP) pada komoditas pisang mas Kirana menunjukkan selisih antara penerimaan dengan biaya yang sesungguhnya diterima atau dibayar oleh petani pisang mas Kirana. Apabila nilai PP komoditas pisang

mas Kirana lebih besar dari nol berarti secara finansial usahatani pisang mas Kirana menguntungkan untuk diusahakan. Apabila nilai PP komoditas pisang mas Kirana kurang dari nol berarti usahatani pisang mas Kirana tidak menguntungkan pada kondisi intervensi pemerintah terhadap input dan output. Keuntungan sosial (*Social Profit* atau SP) pada komoditas pisang mas Kirana menunjukkan selisih antara penerimaan dengan biaya yang dihitung dengan harga sosialnya atau harga bayangan. Apabila nilai SP komoditas pisang mas Kirana lebih besar dari nol berarti secara ekonomi usahatani pisang mas Kirana menguntungkan pada kondisi pasar persaingan sempurna. Apabila nilai SP komoditas pisang mas Kirana kurang dari atau sama dengan nol berarti usahatani pisang mas Kirana tidak menguntungkan pada kondisi pasar persaingan sempurna. Untuk menganalisis aspek profitabilitas pisang mas Kirana dilakukan perhitungan dengan menggunakan matriks *Policy Analysis Matrix* (PAM).

Menurut Monke and Pearson dalam Pearson (2005), *Policy Analysis Matrix* (PAM) atau matrik kebijakan digunakan untuk menganalisis pengaruh intervensi

pemerintah dan dampaknya pada sistem komoditas. Metode PAM membantu pengambilan kebijakan baik di pusat maupun di daerah untuk menelaah tiga isu sentral analisis kebijakan pertanian.

Metode PAM merupakan suatu analisis yang dapat mengidentifikasi tiga analisis yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial/ekonomi, analisis daya saing (keunggulan kompetitif dan komparatif) serta analisis dampak kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem komoditas. Dibandingkan dengan perhitungan efisiensi ekonomi (*benefit cost analysis*) yaitu perhitungan yang digunakan untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu proyek, perhitungan dengan menggunakan matrik PAM dapat dilakukan secara keseluruhan dan sistematis. Pada analisis PAM, kemampuan analisis tidak hanya untuk memantau keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif atau efisiensi finansial dan ekonomi, tetapi sekaligus melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan pemerintah (Pearson, 2005). Hasil perhitungan menggunakan matriks PAM untuk usahatani pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang sebagai berikut.

Berdasarkan perhitungan PAM pada tabel

Tabel 2
Matriks PAM Usahatani Pisang Mas Kirana

	Tradables		Total	Profits
	Output	Inputs	Domestic Factors	
Private	29.988.631,8	240.000,0	20.303.720,0	9.444.911,8
Social	44.904.661,9	438.246,6	22.496.631,6	21.969.783,7
Divergences	-14.916.030,2	-198.246,6	-2.192.911,6	-12.54.871,9

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

2 di atas, menunjukkan usahatani pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang dapat dikatakan menguntungkan secara ekonomi dan finansial karena menghasilkan nilai keuntungan yang positif. Akibat adanya distorsi perdagangan yang dilakukan pemerintah, petani pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang memperoleh keuntungan privat sebesar Rp 10.444.911,8 per hektar. Hal tersebut disebabkan usahatani pisang mas Kirana menghasilkan penerimaan

privat sebesar Rp 29.988.631,8 per hektar yang lebih besar daripada biaya faktor domestik yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 19.303.720 per hektar. Apabila pasar pisang mas Kirana berada dalam kondisi pasar persaingan sempurna dan tanpa ada distorsi kebijakan, produsen pisang mas Kirana mampu memperoleh keuntungan sosial sebesar Rp 23.108.983,7 per hektar. Besarnya keuntungan sosial disebabkan oleh penerimaan sosial usaha-

tani pisang mas Kirana yang tinggi yaitu sebesar Rp 44.904.661,9 per hektar dan karena harga sosial pisang mas Kirana yang tinggi yaitu sebesar Rp 8.848,21 per kilogram. Penggunaan input *tradable* (pupuk urea) yang rendah akan menurunkan biaya faktor domestik yang mengandung komponen impor sehingga mampu meningkatkan keuntungan sosial usahatani pisang mas Kirana. Secara keseluruhan aspek profitabilitas usahatani pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang dapat dikatakan menguntungkan secara finansial dan ekonomi.

Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pisang Mas Kirana

Perkembangan dan pembangunan agribisnis pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari sentuhan peran pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diindikasikan dapat mempengaruhi kondisi daya saing komoditas pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang. Kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kondisi daya saing komoditas pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang adalah intervensi pemerintah daerah. Sebelum mengenalkan pisang mas Kirana sebagai icon Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang telah lama melakukan pendampingan kepada petani pisang mas Kirana. Beberapa kegiatan

yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang sejak tahun 2006 memfasilitasi pembuatan *Good Agriculture Practice* (GAP) pisang mas Kirana melalui penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada petani pisang mas Kirana dalam menerapkan SPO tersebut guna mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pisang mas Kirana yang dihasilkan oleh petani dan melakukan pengembangan pasar dan pemasaran pisang mas Kirana dengan mendukung dan memfasilitasi pemasaran dengan PT. Sewu Segar Nusantara dan kerjasama dengan BNI untuk kemudahan dalam permodalan usaha.

Adanya kebijakan pemerintah terhadap komoditas pisang mas Kirana pada matriks PAM ditunjukkan pada baris ketiga matriks PAM merupakan selisih antara baris pertama yaitu harga privat dan baris kedua yaitu harga sosial yang menggambarkan divergensi. Divergensi adalah selisih antara harga privat dengan harga sosial. Indikator-indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap pisang mas Kirana antara lain transfer output, transfer input, transfer faktor, NPCO, NPCI, EPC, PC dan SRP. Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 2, kemudian dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah dengan indikator-indikator tersebut. Adapun hasil analisis indikator-indikator Dampak Kebijakan

Tabel 3
Indikator-Indikator Dampak Kebijakan Pemerintah pada Usahatani Pisang Mas Kirana

No.	Indikator	Nilai
1	Transfer output (OT) (Rp/Ha)	-14.916.030,2
2	Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO)	0,6678
3	Transfer input (IT) (Rp/Ha)	-198.247
4	Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI)	0,5476
5	Transfer Faktor (FT) (Rp/Ha)	-2.192.912
6	Koefisien Proteksi Efektif (EPC)	0,6690
7	Transfer Bersih (NT) (Rp/Ha)	-12.524.872
8	Koefisien Keuntungan (PC)	0,4299
9	Rasio Subsidi Produsen (SRP)	-0,2789

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Pemerintah pada Usahatani Pisang Mas Kirana di Kabupaten Lumajang Tabel 3.

Kebijakan pemerintah dalam aktivitas ekonomi dapat memberikan dampak positif atau negatif bagi para pelaku ekonomi, demikian pula dengan usahatani pisang mas Kirana. Kebijakan pemerintah dapat berupa subsidi, pajak dan penentuan tarif impor. Dampak kebijakan pemerintah bisa dilihat melalui indikator-indikator dalam transfer output dan koefisien proteksi terhadap output. Berdasarkan hasil perhitungan PAM pada tabel 3, nilai OT sebesar negatif Rp 14.916.030 per hektar. Nilai OT negatif mengindikasikan bahwa penerimaan privat lebih rendah daripada penerimaan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh harga domestik usahatani pisang mas Kirana lebih rendah dari pada harga sosialnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen dalam negeri membeli pisang mas Kirana dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya dibayar diakibatkan banyaknya buah sejenis yang bersaing di pasar domestik. Masih belum adanya kebijakan pemerintah akan pasar pisang mas Kirana di dalam negeri. Selama ini pasar pisang mas Kirana di dalam negeri disetarakan dengan pasar pisang yang sejenis.

Dampak kebijakan terhadap output pada usahatani pisang mas Kirana juga dapat dilihat dari nilai koefisien NPCO. Nilai NPCO usahatani pisang mas Kirana sebesar 0,667 yaitu kurang dari 1 ($\text{NPCO} < 1$). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan domestik (privat) pisang mas Kirana lebih rendah sebesar 33,22 persen daripada penerimaannya sosialnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam proteksi petani pisang mas Kirana masih belum efektif sehingga penerimaan yang diterima oleh petani menjadi lebih rendah. Pada kenyataan di lapangan tidak ada kebijakan pemerintah yang benar-benar terjadi pada komoditi pisang mas Kirana. Rendahnya harga pisang mas Kirana yang diterima petani disebabkan oleh ketidakefektifan peran kelompok tani dan kurangnya pemberdayaan petani dalam menguasai informasi harga,

jaringan pasar dan kontinuitas produksi. Adanya hal demikian membuat para petani berada dalam posisi tawar-menawar yang lemah karena petani tidak memiliki alternatif lain untuk menjual pisang mas Kirana selain kepada pedagang pengumpul yang kemudian dijual pada perusahaan mitra yaitu PT. Sewu Segar Nusantara. Adanya hal demikian, dapat dikatakan komoditas pisang mas Kirana mengalami distorsi pasar yang disebabkan adanya subsidi dari pemerintah pada input *tradabel* dan non *tradable*-nya dan masih belum adanya kebijakan pemerintah akan pasar pisang mas Kirana di dalam negeri sehingga terjadi monopsoni harga dari perusahaan mitra yang disesuaikan dengan kriteria dan syarat kualitas pisang mas Kirana yang selama ini ditentukan oleh perusahaan mitra.

Kebijakan pemerintah tidak hanya berpengaruh terhadap output, tetapi juga berpengaruh terhadap input. Kebijakan tersebut berupa subsidi (positif atau negatif) dan hambatan perdagangan (penetapan tarif atau kuota) agar produsen dapat memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan pemerintah dapat melindungi produsen pisang mas Kirana dalam negeri. Ukuran besarnya insentif pemerintah terhadap input produksi usahatani pisang mas Kirana dapat dilihat dari nilai transfer input (IT), koefisien proteksi input nominal (NPCI) dan transfer faktor (FT).

Transfer input merupakan indikator untuk melihat besarnya divergensi (distorsi kebijakan) yang dikenakan pada input *tradable*. Berdasarkan tabel 3, nilai IT usahatani pisang mas Kirana adalah sebesar negatif Rp 198.247 per hektar menunjukkan bahwa biaya input *tradabel* yang dikeluarkan lebih rendah sebesar 45 persen dari biaya input *tradabel* yang seharusnya dikeluarkan. Nilai IT negatif mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan keuntungan yang diterima petani pisang mas Kirana secara finansial lebih kecil daripada keuntungan sosialnya. Adanya subsidi pada biaya input *tradable* yang mengurangi biaya input dengan sendirinya.

Koefisien proteksi input nominal

(NPCI) menunjukkan besarnya tingkat insentif yang diberikan pemerintah terhadap input *tradable*. Berdasarkan tabel 4.8, nilai NPCI diperoleh sebesar 0,547 yaitu kurang dari 1 ($NPCI < 1$). Nilai NPCI yang kurang dari satu menunjukkan bahwa adanya proteksi terhadap produsen input, karena adanya subsidi dari pemerintah terhadap input *tradable* dan *non tradable* yang dapat mengurangi biaya input dengan sendirinya. Subsidi yang dibebankan atas pupuk urea (input *tradable*), total biaya input *tradable*-nya sebesar 54 persen dari biaya yang seharusnya dikorbankan seandainya tidak ada subsidi dari pemerintah.

Transfer faktor (FT) menunjukkan dampak kebijakan pada input faktor domestik seperti sewa lahan, modal, peralatan, transportasi dan tenaga kerja. Nilai FT pada usahatani pisang mas Kirana sebesar negatif Rp 2.192.912 per hektar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya distorsi pasar yang diakibatkan adanya subsidi positif atau terjadi transfer ke petani dari pemerintah dan produsen input domestik sehingga petani mengeluarkan biaya input *tradable* lebih rendah daripada harga sosialnya. Selain adanya subsidi pada biaya input *tradable*, terjadinya atas biaya modal yang lebih bersifat implisit. Implisit subsidi modal kerja timbul karena tingkat bunga modal kerja sosial pada *social opportunity cost* sebesar 20,36 persen per tahun (1,69 persen per bulan) sedangkan pada tingkat bunga modal kerja privat sebesar 12 persen (1 persen per bulan). Transfer faktor domestik atas modal kerja merupakan subsidi sebesar 41,1 persen dari total biaya modal atau sebesar Rp 2.192.911,6 per hektar. Secara keseluruhan pada usahatani pisang mas Kirana dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah berupa subsidi terhadap input telah memberikan insentif kepada petani pisang mas Kirana untuk mengembangkan usahanya.

Kebijakan pemerintah terhadap input-output merupakan analisis gabungan dari kebijakan input dan kebijakan output. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dijelaskan melalui indikator-indikator seperti nilai koefisien proteksi efektif (EPC),

transfer bersih (NT), koefisien keuntungan (PC) dan rasio subsidi bagi produsen (SRP). Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa nilai EPC usahatani pisang mas Kirana adalah sebesar 0,669. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa nilai tambah yang diperoleh petani (privat) lebih rendah daripada nilai tambah yang seharusnya diterima petani (sosial). Hal ini berarti pengaruh instrumen kebijakan pemerintah berupa subsidi terhadap input berupa pupuk urea dan harga domestik pisang mas Kirana yang lebih rendah dari pada harga sosialnya sehingga menimbulkan dampak disinsentif bagi pengembangan produksi pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang.

Indikator lain yang menunjukkan dampak kebijakan proteksi pemerintah terhadap petani pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang adalah transfer bersih (NT). NT digunakan untuk melihat besarnya tambahan surplus produsen atau berkurangnya surplus produsen akibat intervensi pemerintah. Nilai NT usahatani pisang mas Kirana di kabupaten Lumajang sebesar negatif Rp 12.524.872 per hektar. Nilai NT yang negatif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berupa subsidi terhadap input dan output masih belum memberikan insentif ekonomi untuk meningkatkan produksi.

Koefisien keuntungan (PC) adalah perbandingan antara keuntungan bersih privat dengan keuntungan bersih sosial. PC merupakan indikator yang menunjukkan dampak insentif dari semua kebijakan output, kebijakan input asing dan input domestik. Berdasarkan tabel 3, nilai PC usahatani pisang mas Kirana sebesar 0,429 yaitu kurang dari 1 ($PC < 1$) menunjukkan bahwa sistem usahatani pisang mas Kirana ini menerima 42,99 persen dari keuntungan privat yang seharusnya atau 57,01 persen lebih tinggi dari keuntungan yang seharusnya diterima seandainya terjadi kebijakan. Hal demikian dikarenakan, konsumen dalam negeri membeli pisang mas Kirana dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya dibayar diakibatkan banyaknya

buah sejenis yang bersaing di pasar domestik. Masih belum adanya kebijakan pemerintah akan pasar pisang mas Kirana dan selama ini pasar pisang mas Kirana disetarakan dengan pasar pisang yang sejenis.

Rasio subsidi bagi produsen (SRP) merupakan perbandingan antara nilai transfer bersih dengan nilai output yang dihasilkan pada tingkat harga sosial (penerimaan sosial). Nilai SRP menunjukkan tingkat penambahan atau pengurangan penerimaan atas komoditi pisang mas Kirana akibat adanya intervensi pemerintah. Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa nilai SRP sebesar negatif 0,2789 yaitu kurang dari 1 ($SRP < 1$) artinya transfer akibat kebijakan pemerintah yang terjadi menyebabkan pendapatan petani pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang menjadi lebih rendah 27,89 persen dibandingkan tanpa adanya kebijakan pemerintah. Hal tersebut terjadi demikian menunjukkan pengaruh dari kebijakan pemerintah pada saat penelitian dilakukan berdampak negatif terhadap penerimaan petani. Biaya produksi yang diinvestasikan petani lebih besar daripada nilai keuntungan yang seharusnya diterima. Rendahnya harga pisang mas Kirana yang dibeli oleh konsumen dalam negeri serta harga produk pisang mas Kirana yang bersaing dengan harga pisang yang sejenis juga berpengaruh terhadap penerimaan petani pisang mas Kirana yang seharusnya diterima.

SIMPULAN

Hasil analisis aspek profitabilitas pisang mas Kirana per hektar menunjukkan bahwa pisang mas Kirana menguntungkan baik secara finansial (privat) maupun secara ekonomi (sosial). Keuntungan privat pisang mas Kirana sebesar Rp 10.444.911,8 per hektar dan keuntungan sosial sebesar Rp 23.108.983,7 per hektar. Kebijakan pemerintah penerapan SPO pada komoditas pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang berdampak nyata terhadap pendapatan petani pada keuntungan privatnya. Untuk mempertahankan

dan mengembangkan potensi unggulan pisang mas Kirana, diperlukan kebijakan yang lebih lanjut dari pemerintah daerah maupun provinsi akan pasar pisang mas Kirana baik dari segi pembudidayaan untuk dapat mempertahankan kualitas buah, bentuk kerjasama dan ketentuan harga pisang mas Kirana sehingga kualitas komoditas pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang dapat terkontrol dan dapat mempertahankan perolehan sertifikat keamanan dan mutu produk setiap tahunnya serta mendapat kepastian pasar di dalam negeri. Diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk mengembangkan sub terminal agribisnis sampai tingkat kecamatan disertai dengan pelatihan dan standarisasi mutu produk sebagai wadah berkumpulnya produk-produk unggulan di Kabupaten Lumajang sehingga baik konsumen lokal maupun luar daerah Kabupaten Lumajang dapat dengan mudah menemukan dan membeli pisang mas Kirana di Kabupaten Lumajang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Dr. Luh Putu Suciati, SP., M.Si dan Dr. Ir. Sugeng Raharto, MS atas masukannya selama penulisan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sesama pejuang di Program Pascasarjana Agribisnis yaitu Pascaagri 2013 atas dukungan morilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2013. On the Competitiveness and Sustainability of the Indonesian Agricultural Export Commodities. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting* 1(1): 81-100.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Produksi buah-buahan dan Sayuran Tahunan di Indonesia Tahun 1995-2013*. <http://bps.go.id>. Diakses tanggal 7 Maret 2015.
- Direktorat Budidaya Tanaman Buah. 2006. *Pedoman Sistem Jaminan Mutu Mel-*

alui Standart Prosedur Operasional (SPO) Pisang Mas Kirana Kabupaten Lumajang. Jakarta.

- Frannoto, 2011. Sang Primadona dari Lumajang. <http://www.eastjavatraveler.com>. Diakses tanggal 31 Desember 2014.
- Tamami, N. 2012. Potensi Usahatani Melati Ratoh Ebuh Sebagai Komoditi Unggulan Daerah di Jawa Timur. *Agriekonomika* 1(2): 160-180.
- Pearson, S, Carl Gotsch dan Sjaiful Bahri. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Solicha, Zumrotun. 2011. Pisang Mas Kirana dapat Kurangi Stress. <http://www.antarajatim.com>. Diakses tanggal 31 Desember 2015.
- Timmer, C. Peter, Walter P. Falcon and Scott R. Pearson. 1983. *Food Policy Analysis*. Publish for The World Bank The Johns Hopkins University Press Bltimore and London. <http://www.stanford.edu/group/FRI/indonesia/documents/foodpolicy/fronttoc.fm.html>. Diakses tanggal 03 Maret 2016.
- Vega, Luz Leyda and Rosado. The International Competitiveness of Puerto Rico Using the Porter's Model. *Journal JGC* 14(2): 95-111.
- Wibowo, Yuli. 2010. Analisis Prospektif Strategi Pengembangan Daya Saing Perusahaan Daerah Perkebunan. *Jurnal AGROINOTEK* 4(2): 104-113.
- Witjaksono, R., Mudiyono., & Hariadi, S. 2012. Aksesibilitas Petani Dalam Agribisnis Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. *Agriekonomika* 1(2): 89-102.
- Worldbank. 2016. Price, Expor and Impor Data. <http://dataworldbank.org>. Diakses tanggal 07 Maret 2016.